

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TERHADAP PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG  
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA  
(STUDI DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**TIO PRASETIO  
NIM. 11527104526**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TERHADAP PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI  
KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG  
PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG  
DENGAN GANGGUAN JIWA  
(STUDI DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU)**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar  
Serjana Hukum  
(SH)*



**OLEH :**

**TIO PRASETIO  
NIM. 11527104526**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu)."

Nama : TIO PRASETIO

NIM : 11527104526

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi



Peri Pirmansyah S.H., M.H  
NIK.130217120

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA** (Studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu), yang ditulis oleh:

Nama : **TIO PRASETIO**  
 NIM : **11527104526**  
 Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : **Jumat, 08 November 2019**  
 Waktu : **13:30**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Drs. Zainal Arifin, M.A**

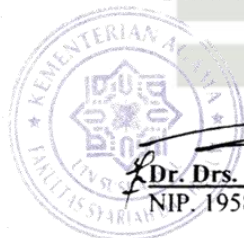
Sekretaris  
**Roni Kurniawan S.H., M.H**

Penguji I  
**Joni Alizon S.H., M.H**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu S.H., M.H**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### ABSTRAK

**Go Prasetyo (2019): Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu)**

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa disebutkan bahwa penanggulangan pemasungan adalah upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa dalam rangka penghapusan pemasungan. Adapun tindakan ataupun upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan jiwa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar adalah Advokasi dan sosialisasi, Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau dan Kunjungan Rumah (*home visit*) atau layanan rumah. Namun pada kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Kampar masih belum melaksanakan secara maksimal apa yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tersebut.

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu), serta apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, studi keperpustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu) tidak berjalan sesuai ketentuan tersebut. Masih ada beberapa faktor kendala yang ditemukan seperti lemahnya pemahaman tenaga medis dan keluarga orang dengan gangguan jiwa dalam memahami masalah kesehatan jiwa, anggaran yang masih belum memadai dan Tenaga medis khusus belum tersedia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan`nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga,sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu)”**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan buat Nabi Muhammad SAW. semoga kita mendapat syafa'at beliau di yaumil akhir kelak, *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dibidang akademik dan keorganisasian sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapat dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Janizar dan Ibunda tercinta Resmawati yang do'a, nasehat, petuah kebajikan, tunjuk ajar serta dukungan yang tak terhingga





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senantiasa mengalir tiada henti-hentinya kepada anak-anaknya, semata-mata agar anaknya menjadi orang yang berguna, dan berakhlak mulia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandri, MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
5. Bapak Wahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
6. Bapak Dr. Maghfirah, M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh jajaran dibawahnya.
7. Bapak Firdaus, SH, MH, selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Penasehat Akademik (PA) beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.
8. Bapak Muslim, S.Ag. SH., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen yang dengan tulus ikhlas dalam memberikan pengajaran proses transfer ilmu serta bimbingan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH, sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga tercinta, Terkhusus untuk adik kandung Zahra Mutia dan Resayona serta Keluarga Besar yang selalu memberikan motivasi, do'a, serta dukungan.
11. Teruntuk teman – teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, nasehat, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapat balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 21 Oktober 2019  
Penulis

**TIO PRASETIO**  
**NIM. 11527104526**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Metode Analisis Data.....	16
H. Metode Penarikan Kesimpulan .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>10</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar .....	10
1. Letak Geografis Kabupaten Kampar .....	20
2. Gambaran Umum Demografis.....	25
B. Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.....	26
1. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar .....	28
2. Strategi dan Arah Kebijakan.....	29
3. Program Prioritas .....	29
C. Gambaran Umum Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	30
1. Geografis Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	31
2. Gambaran Umum Demografis.....	31
3. Pemerintahn .....	32
<b>BAB III</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>
A. Teori Pemerintahan Daerah.....	36
1. Pengertian Pemerintah Daerah .....	36
2. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	38
B. Teori Gangguan Jiwa.....	40
1. Defenisi Gangguan Jiwa .....	40
2. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa .....	41
3. Ciri-Ciri Gangguan Jiwa.....	43
4. Dampak Gangguan Jiwa .....	43
5. Upaya Penanganan Gangguan Jiwa.....	44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

## BAB V

C. Teori Pemasungan .....	46
1. Pengertian Pasung .....	46
2. Sejarah Pemasungan .....	47
3. Faktor Pemasungan Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa .....	47
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu).....	51
1. Advokasi dan Sosialisasi .....	53
2. Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau.....	58
3. Kunjungan Rumah (home visit) atau Layanan Rumah .....	63
B. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu).....	65
1. Lemahnya pemahaman tenaga medis dan keluarga orang dengan gangguan jiwa dalam memahami masalah kesehatan jiwa .....	66
2. Anggaran Yang Belum Memadai .....	67
3. Tenaga medis Khusus Belum Tersedia .....	69
<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel.I.1	Populasi dan Sample .....	14
Tabel.II.2	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar.....	22
Tabel.II.3	Penduduk Kabupaten Kampar Tahun2018.....	25
Tabel.II.4	Jumlah penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu .....	31
Tabel.II.5	Rincian Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kampar ....	33
Tabel.IV.6	Data ODGJ Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	68



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang berasaskan Pancasila sebagai Ideologi berbangsa dan bernegara yang mana ini merupakan patokan dalam berkehidupan agar cita-cita leluhur dari pada pendiri bangsa kita dapat terwujud dengan baik dan damai serta menuju kearah yang lebih baik lagi kedepannya. Adapun ciri-ciri Negara Hukum adalah; adanya jaminan atas Hak Asasi Manusia (*Grondrechten*), adanya pembagian kekuasaan (*Scbeiding Van Machten*), adanya peradilan administrasi (*Administratief rechtspraak*).<sup>1</sup>

Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu Negara. Status Kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara Warga Negara dan Negeranya. Sebaliknya, Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap Warga Negeranya<sup>2</sup>, untuk menjamin Hak-Hak Warga Negara dan Memajukan dan memajukan berkehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat adil dan makmur serta menjunjung Hak-Hak Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dan berlandaskan Hukum yang baik, didasari dicantulkannya didalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasca Amandemen, yaitu tercantum didalam Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Disarikan dari buku SF Marbun dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002 ), h. 9

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), h. 23

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 5

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu hukum merupakan salah satu Instrumen penting dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun salah satu fungsi hukum adalah, yaitu : 1. Pengawasan / Pengendalian sosial ( *Social Control* ), 2. Penyelesaian sengketa ( *Dispute settlement* ), 3. Rekayasa Sosial ( *Social Engineering* ).<sup>4</sup>

Sebagai Negara Hukum sepatutnya berkehidupan harus berlandaskan kepada Hukum dan menaatinya, dengan berjalannya hukum pada rel nya dengan baik, maka berkehidupan berbangsa dan bernegara pun akan tercipta dengan baik, tentunya dengan perangkat hukum dan didukung dengan instrumen hukum serta yang tak kalah pentingnya adalah para penegak Hukum itu sendiri / para aparat penegak Hukum yang berwenang dalam penegakan Hukum yang harus dan wajib menciptakan serta mengkondisikan penegakan hukum yang seadil-adilnya yang tidak tumpul keatas dan tajam kebawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata Hukum. Dan menjunjung Hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenarnya dan seadil-adilnya. Perkataan dan penegakan hukum sering diartikan sebagai menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas menegakkan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya suatu perwujudan konsep-konsep yang Abstrak menjadi kenyataan.<sup>5</sup>

Mengingat bahwa pentingnya menjaga dan mempertahankan Hak Asasi Manusia, Hal ini telah diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa (1) *Setiap orang berhak*

<sup>4</sup> Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2012), h. 10

<sup>5</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: kalimedia, 2017), h.229



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>6</sup>

Pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Tindakan pemasungan akan mengalami keterbatasan ruang gerak dan akan kesulitan mendapatkan akses informasi akses pendidikan atau akses kesehatan. Dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa “Setiap orang bebas hidup dari peniksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.<sup>7</sup>

Pada intinya dampak tindakan pemasungan yaitu si korban akan mengalami keterbatasan ruang dan gerak seperti manusia normal pada umumnya, otomatis hak-hak yang disebutkan diatas dan hak lainnya tidak akan diperoleh akibat dari pemasungan. Pemasungan terhadap orang yang diduga mengidap gangguan jiwa merupakan tindakan yang bertentangan dengan HAM. Tindakan pemasungan merupakan gejala yang umum ditemukan dinegara berkembang, termasuk Indonesia. Ketiadaan aturan hukum, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan pemahaman terhadap gejala gangguan jiwa, serta keterbatasan ekonomi merupakan faktor utama munculnya kejadian pasung.<sup>8</sup>

Dibeberapa masyarakat pedesaan, pemasungan ini dilakukan terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau mental, sehingga pemasungan ini menjadi

<sup>6</sup> pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>7</sup> Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945

<sup>8</sup> Alifiadzi Fitrikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi Dan Sosial Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan Pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, (Semarang: Media Medika Indonesiana, 2012), h. 22



salah satu cara untuk mengendalikan orang dengan gangguan jiwa, dalam hal ini sangat perlunya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana Undang-undang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintahan Daerah yaitu Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti Pendidikan Dasar, Kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana Lingkungan, dan lain-lain.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan, dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah mempunyai kewajiban: a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c) mengembangkan kehidupan demokrasi; d) mewujudkan keadilan dan pemerataan; e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h) mengembangkan sistem jaminan sosial; i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j) mengembangkan sumberdaya produktif di daerah; k) melestarikan lingkungan hidup; l) mengelola administrasi kependudukan; m) melestarikan nilai sosial budaya; n) membentuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o) kewajiban lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa:<sup>10</sup>

#### Pasal 5

- (1) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODGJ sehingga dapat berfungsi optimal baik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
- (2) Pencegahan Pemasungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. advokasi dan sosialisasi;
  - b. fasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan;
  - c. penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan terjangkau;
  - d. pemberian tata laksana untuk mengontrol gejala melalui terapi medikasi maupun non medikasi; dan
  - e. pengembangan layanan rawat harian (day care).

Kemudian dijelaskan juga didalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut pada:

<sup>9</sup> Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 11

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. *Menetapkan kebijakan pelaksanaan Penanggulangan Pemasungan ODGJ dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini;*
- b. *Melakukan koordinasi dan jejaring kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait serta melakukan kemitraan dengan lembaga swadaya Masyarakat maupun akademisi yang relevan;*
- c. *Melakukan bimbingan teknis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mengimplementasikan kebijakan dan percepatan pencapaian tujuan Penanggulangan Pemasungan ODGJ;*
- d. *Melakukan pemetaan terhadap masalah Pemasungan pada lingkup Kabupaten/kota;*
- e. *Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia bidang Kesehatan Jiwa di tingkat Kabupaten/kota;*
- f. *Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana termasuk obat dan alat Kesehatan yang diperlukan di tingkat Kabupaten/kota;*
- g. *Menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat primer dan rujukan dalam melakukan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ sesuai dengan kemampuan;*
- h. *Menyediakan dukungan pembiayaan;*
- i. *Mengimplementasikan sistem data dan informasi; dan*
- j. *Melakukan pemantauan dan evaluasi.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan Pasal diatas, telah jelas diatur peranan dari Pemerintah Daerah yaitu untuk penanganan Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dari empat masalah Kesehatan utama di Negara-negara maju. Meskipun masalah Kesehatan Jiwa tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian secara langsung, namun gangguan tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan individu dalam berkarya serta ketidak tepatan individu dalam berperilaku yang dapat mengganggu kelompok dan Masyarakat serta dapat menghambat pembangunan karena mereka tidak produktif.<sup>11</sup>

Upaya kesehatan jiwa yang dilaksanakan pemerintah harusnya berasaskan Keadilan, Prikemanusiaan, Manfaat, Transparansi, Akuntabilitas, Komprehensif, Perlindungan dan Non-diskriminatif. Bahkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Jiwa meyebutkan bahwa upaya promotif dalam kesehatan jiwa salah satunya dimaksudkan untuk menghilangkan Stigma, Diskriminasi, pelanggaran Hak Asasi orang dengan Gangguan Jiwa.<sup>12</sup>

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia sehingga setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi-tingginya dan dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Hawari, Dadang. *Manajemen stress, cemas dan depresi*, (Jakarta: FKUI. 2001), h. 12

<sup>12</sup> Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

<sup>13</sup> Lestari dkk., *Kitab Undang Undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran*, Cetakan pertama, (Jogjakarta: Buku Biru, 2012), h. 96

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemahaman masyarakat yang masih kurang untuk mengenali tentang gangguan jiwa itu sendiri mengakibatkan penderita akan dibawa ke fasilitas kesehatan jika sudah mengalami gangguan psikotik berat yaitu semua kondisi yang memberi indikasi terdapatnya hendaya.<sup>14</sup> Keluarga pengidap gangguan jiwa yang dipasung ini kebanyakan berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Tentu saja dengan ekonomi yang lemah, pihak keluarga kesulitan untuk mengobati secara pribadi dikarenakan kendala dalam pembiayaan.

Upaya rehabilitatif kesehatan jiwa ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, dan memberi kemampuan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam pemberian rehabilitas tersebut agar pencegahan terhadap ODGJ tidak semakin meningkat.

Dalam hal ini telah ditegaskan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang telah mengatur juga tentang perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa tersebut, yaitu:

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.

---

<sup>14</sup> Poppy Kumala, dkk, , *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, Penerbit, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1998), h. 322

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:

- a. tidak mampu;
- b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
- c. tidak diketahui keluarganya.

Melihat dari tuturan Peraturan diatas, maka sangat jelas dikatakan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Terkhusus yang terjadi di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terlihat bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa kurangnya mendapatkan Perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam memperhatikan masalah kesehatan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dipasung maupun yang memungkinkan untuk dipasung, tentu saja ini akan menjadi masalah serius jika tidak dilakukan penanganan dengan segera.

Di Kecamatan Koto Kampar Hulu ada beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa seperti Samsul masril yang berumur 34 Tahun bertempat tinggal di Desa Gunung Malelo yang mengalami Gangguan Jiwa sejak Tahun 2017, Nener Sirna berumur 60 Tahun bertempat tinggal di Desa Tanjung yang mengalami Gangguan Jiwa sejak Tahun 2016, dan berumur 52 Tahun bertempat tinggal di Desa Sibiruang yang mengalami Gangguan Jiwa sejak tahun 2012.

Dalam hal ini pemasangan yang dilakukan pihak keluarga tidak dibarengi dengan pelayanan medis dari pihak terkait. Pihak keluarga mengaku tidak adanya



rehabilitasi kunjungan rumah dari Puskesmas di Kecamatan Koto Kampar Hulu tersebut.

Dari paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (STUDI DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU)”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu)?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu)?

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka maksud dari tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu).

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat didapat dan diperoleh dari kegiatan penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan pemikiran dan sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai bahan bacaan dan acuan dalam pembuatan penelitian mahasiswa selanjutnya.
- c. Sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### F. Metode Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, maka metode penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

###### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, penelitian sosilologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan infestigasi fenomenal secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antar fenomena,<sup>15</sup> yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dan studi kepustakaan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),h. 42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat *deskriptif* Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>17</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Puskesmas Koto Kampar Hulu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.<sup>18</sup> Adapun yang menjadi populasi adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebanyak 2 orang, pihak Puskesmas Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 2 orang dan Keluarga orang dengan gangguan jiwa di kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 23 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>19</sup> Dan yang menjadi sample adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebanyak 2 orang, pihak Puskesmas Kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 2 orang dan Keluarga orang dengan gangguan jiwa di kecamatan Koto Kampar Hulu sebanyak 12 orang.

<sup>17</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25-26

<sup>18</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 79

<sup>19</sup> *Ibid*, h.79

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini juga diikuti dengan metode *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

**TABEL I.1**  
**POPULASI DAN SAMPEL**

NO	NAMA	POPULASI	SAMPEL	JUMLAH
1	Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar	2	2	100%
2	Pihak Puskesmas Kecamatan Koto Kampar Hulu	2	2	100%
3	Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa	23	12	52,1 %
	Jumlah	27	14	51,6 %

*Olahan data penulis*

**4. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>20</sup> Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kepala Puskesmas Koto Kampar Hulu dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar baik melalui wawancara maupun observasi.

<sup>20</sup> Amiruddin & H. Zainal Asikin, *op. cit.* h.30

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara ( data yang dihasilkan pihak lain ) atau data yang digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan lembaga merupakan pengolahannya, tapi dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan diteliti.

**c. Data Tersier**

Data tersier ialah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Data Primer dan maupun Sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedie dan lain-lain.<sup>21</sup>

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka, maka dengan landasan tersebut pengumpulan data dilakukan dengan cara :

**a. Observasi**

Untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>22</sup> Yaitu penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti.

<sup>21</sup> *Ibid*, h.82

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*,h. 58



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>23</sup> Yaitu mengemukakan pertanyaan-pertanyaan secara lisan mengenai masalah yang akan diteliti.

#### c. Studi Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain.<sup>24</sup> Yaitu mengkaji literatur-literatur yang tersedia yang berkaitan dan berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua sumber data telah berhasil dikumpulkan nantinya, maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas pada kesimpulan akhirnya.

Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h.59

<sup>24</sup> J.supranto, *op.cit.* h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **H. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan untuk mengelolah dan menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis menggunakan Metode Deduktif. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum ke khusus.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini, serta mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dibahas pada setiap bab, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data, Metode Penarikan Kesimpulan dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang Gambaran umum, geografis dan demografis Kabupaten Kampar. Gambaran umum, visi strategi, arah kebijakan dan program prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Gambaran umum, geografis, demografis dan pemerintahan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan teoritis yang melandasi penelitian ini, memuat uraian teori pemerintahan daerah, teori Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan Teori pemasungan.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini dipaparkan tentang pembahasan dan hasil penelitian yaitu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu), Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu).

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang dicantumkan dalam penelitian pada penyusunan skripsi ini

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar pada awalnya terbentuk melalui Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950 tentang Penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian pada tahun 1956 dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar sebagai Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah  $\pm 30.569,56 \text{ Km}^2$  dengan pusat pemerintahan di Bangkinang.<sup>25</sup>

Kabupaten Kampar awalnya merupakan daerah otonom dengan wilayah relatif sangat luas dan terbagi dalam 19 kecamatan dengan 2 Pembantu Bupati sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian yang mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan dan Tambusai dan Pembantu Bupati Wilayah II berkedudukan di Pangkalan Kerinci mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut dan Kuala Kampar. Penetapan pembagian wilayah pembantu Bupati tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS.318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.

<sup>25</sup> Data Kabupaten Kampar, 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Tahun 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu, Kabupaten Kampar (*induk*), Kabupaten Pelalawan (*pemekaran*), dan Kabupaten Rokan Hulu (*pemekaran*) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam. Hingga saat ini Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan 242 Desa serta 8 kelurahan.

#### 1. Letak Geografis Kabupaten Kampar

##### a. Batas administrasi dan Luas wilayah

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40'' Lintang Utara sampai dengan 00° 27'00'' Lintang Selatan dan 100°28'30'' sampai dengan 101° 14'30'' Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.<sup>26</sup>

Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai- sungai kecil, alur, danau, dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat, dan tempat penangkapan

---

<sup>26</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(fishing ground) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak, dan Sungai Tapung) dimanfaatkan sebagai jalur perhubungan antar desa.

Di Wilayah Kabupaten Kampar terdapat tiga buah sungai besar, yaitu :

- Sungai Kampar Kanan yang panjangnya  $\pm 413,5$  km, dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang melewati Kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kuok, Kampar, Tambang dan Kecamatan Siak Hulu ;
- Sungai Kampar Kiri yang melewati Kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan dan Kecamatan Kampar Kiri Hilir ;
- Sungai Siak panjangnya  $\pm 90$  km dan dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m, melintasi kecamatan Tapung Hulu, Tapung dan Kecamatan Tapung Hilir.

Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih  $11,289.28 \text{ km}^2$  atau  $\pm 11,62$  % dari luas wilayah Provinsi Riau [ $94.561,60 \text{ km}^2$ ]. Dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni  $1.365,97 \text{ km}^2$  [12,10%], diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni  $1.301,25 \text{ km}^2$  [11,53%] dan Kecamatan Tapung Hulu  $1.169,15 \text{ km}^2$  [10,36%]. Sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yakni  $76,92 \text{ km}^2$  [0,68%]



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 79,84 km<sup>2</sup> [0,71%] dan Kecamatan Perhentian Raja 111,54 km<sup>2</sup> [0,99%].

**Tabel 1.2**

### Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
1	Kampar Kiri	Lipat Kain	91.533	8,1	1	19
2	Kampar Kiri	Gema		11,5	-	24
	Hulu		130.125			
3	Kampar Kiri	Sungai		6,7	1	7
	Hilir	Pagar	75.974			
4	Kampar Kiri	Simalinya		2,9	-	11
	Tengah	ng	33.059			
5	Gunung	Gunung		5,3	-	9
	Sahilan	Sahilan	59.797			
6	XIII Koto	Batu			1	12
	Kampar	Bersurat	73.240	6,5		
	Koto Kampar	Tanjung		6,0	-	6
	Hulu		67.400			

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
8	Kuok	Kuok	15.141	1,3	-	9
9	Salo	Salo	20.783	1,8	-	6
10	Tapung	Patapahan	136.597	12,1	-	25
11	Tapung Hulu	Senama		10,4	-	14
		Nenek	116.915			
12	Tapung Hilir	Kota Garo	101.356	9,0	-	16
13	Bangkinang Kota	Bangkinan		1,6	2	2
		g	17.718			
14	Bangkinang	Muara		2,2	2	7
		Uwai	25.350			
15	Kampar	Air Tiris	13.628	1,2	1	17
16	Kampar Timur	Kampar		1,5	-	9
			17.308			
17	Rumbio Jaya	Teratak	7.692	0,7	-	7
18	Kampar Utara	Sawah		0,7	-	8
			7.984			

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			Ha	(%)	Kelurahan	Desa
19	Tambang	Sungai	37.194	3,3	-	17
		Pinang				
20	Siak Hulu	Pangkalan	68.980	6,1	-	12
		Baru				
21	Perhentian	Pantai	11.154	1,0	-	5
	Raja	Raja				
Jumlah			1.128.928	100,00	8	242

Sumber data : *Kampar dalam Angka Tahun 2018.*

#### b. Topografi

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0– 500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%.

Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 22<sup>0</sup>C – 33<sup>0</sup>C, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94 persen, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter per tahun. Dengan kondisi lahan tanah yang relative subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, glei humus, alluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

### Gambaran Umum Demografis

#### a. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 sebanyak 747.866 jiwa, secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2018**

No	URAIAN	TAHUN 2018	% TASE
1	Jumlahpenduduk	747.866	100
2	Kepala Keluarga	199.687	
3	Penduduk berdasarkan		
	Jenis kelamin:		
	- Laki-laki	385.516	51,55
	- Perempuan	362.350	48,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar 2018

- Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa rata-rata kerapatan penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2018 sebesar 66jiwa/km<sup>2</sup>, dimana kerapatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kampar yaitu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

363 jiwa/ Km<sup>2</sup>, diikuti dengan kecamatan Kecamatan Rumbio Jaya 233 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan Kampar Utara yaitu 227 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kerapatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 8 jiwa/ Km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu 16 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan Koto Kampar Hulu yaitu 30 jiwa/ Km<sup>2</sup>.

- Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tapung yaitu 87.283 jiwa (11,67%) diikuti Kecamatan Tapung Hulu yaitu 75,686 jiwa (10,12 %) dan Kecamatan Siak Hulu yaitu 77,624 jiwa (10,38%), sementara itu Penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 11,027 jiwa (1,47%) diikuti oleh Kampar Kiri Hilir yaitu 11,796 (1,58%) dan Kecamatan Rumbio Jaya yaitu 17,920 jiwa (2,40%).

#### B. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai penyelenggara urusan Pemerintah dibidang Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dijabarkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 42 Tahun 2016. Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- c. Pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengacu kepada Dokumen Perencanaan yang dimiliki.

Program dan kegiatan Tahun 2018 mengacu pada Dokumen Renja (Rencana Kerja) Tahun 2018 dan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2017-2021. Program Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bersama jajaran kesehatan tidak akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya tanpa keterlibatan dari sektor lain yang terkait, peran lintas sektor dan swasta serta masyarakat umumnya. Bila dikoordinasikan dengan baik secara sinergis maka apa yang menjadi visi kabupaten Kampar dapat tercapai.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Visi dan Strategi Pembangunan Kesehatan Kabupaten Kampar Tahun 2018 yang dijabarkan oleh Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kampar dalam bidang kesehatan pada dasarnya mendukung Visi dan Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kampar.<sup>27</sup>

#### 1. Visi Dinas kesehatan kabupaten kampar

Gambaran Kabupaten Kampar masa depan yang ingin dicapai melalui Pembangunan Kesehatan adalah suatu kondisi dimana masyarakat Kabupaten Kampar menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Dengan kondisi yang demikian masyarakat dapat bebas dari gangguan kesehatan baik yang disebabkan karena penyakit, termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun akibat lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung hidup bersih dan sehat. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk ”Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera ”.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar menyadari bahwa kedepan dengan pernyataan Visi tersebut, diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang kesehatan. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi jajaran Kesehatan mewujudkan sasaran

<sup>27</sup> Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan di Kabupaten Kampar khususnya Pembangunan sektor kesehatan.

### 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Pembangunan tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti walaupun telah ditetapkan tujuan berikut indikator keberhasilannya apabila tidak didukung dengan strategi pencapaian tujuan yang tepat. Oleh karena itu dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pembangunan kesehatan di Kabupaten Kampar, Dinas Kesehatan telah menetapkan strategi pencapaian yang terdiri dari kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Perencanaan strategi mengharuskan dilakukannya segala sesuatu dengan pertimbangan adanya saling keterkaitan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan, sehingga untuk hal tersebut dibutuhkan kebijakan. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, acuan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat agar tercapai.

### 3. Program Prioritas

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan. Agar misi, tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka telah ditetapkan Program dan Kegiatan sektor kesehatan di Kabupaten Kampar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Tahun 2018 program dan kegiatan prioritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah Program upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Peningkatan pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, karena didalamnya terdapat pelayanan UGD 24 jam di Puskesmas se kabupaten kampar, 2) Kegiatan Revitalisasi sistem kesehatan untuk Akreditasi Puskesmas se Kabupaten Kampar, 3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal.

**GAMBARAN UMUM KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

Pemekaran Kecamatan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan baru hasil pemekaran di Kabupaten Kampar dan merupakan pemekaran dari XIII Koto Kampar yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. Kegiatan pemerintahan dimulai setelah diresmikannya Kecamatan Koto Kampar Hulu oleh Bupati Kampar pada tanggal 11 Juni Tahun 2010 yang ibu kecamatannya adalah Tanjung.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Data Kecamatan Koto Kampar Hulu, 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai Kecamatan yang baru dibentuk dengan kondisi serba keterbatasan, aparatur Pemerintah Kecamatan Koto Kampar Hulu berupaya melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan Kecamatan dengan satu tekad agar dapat mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kampar yaitu Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025, terutama di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

#### 1. Geografis Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan salah satu kecamatan di Kabuapten Kampar, yang luas wilayahnya  $\pm 674 \text{ km}^2$  dilihat dari bentang wilayah Kecamatan Koto Kampar Hulu berbatasan :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan XIII Koto Kampar.
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat.

#### Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk di Kecamatan Koto Kampar Hulu per Juli 2018 adalah berjumlah 23.095 jiwa dengan jumlah laki-laki 11.901 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 11.194 jiwa dengan rincian :

Tabel 1.4

#### Jumlah penduduk Kecamatan Koto Kampar Hulu

NO	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	TANJUNG	2.372	2.247	4.619
2.	TABING	923	956	1.879
3.	PONGKAI	792	751	1.543
4.	GUNUNG	3.452	3.239	6.691
5.	MALELO	2.478	2.163	4.641
6.	SIBIRUANG	1.884	1.838	3.722
	BANDUR PICA			
	Jumlah	<b>11.901</b>	<b>11.194</b>	<b>23.095</b>

Dan berdasarkan Data Pemilih Tetap pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 jumlah pemilih sebanyak 11.283 pemilih.

Dari data table diatas terlihat penduduk Desa Gunung Malelo sebanyak 6.691 jiwa, merupakan penduduk terbesar di Kecamatan Koto Kampar Hulu, karena di desa tersebut banyak penduduk pendatang yang bekerja di PT. Padasa Enam Utama.

Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki objek wisata alam yang bernilai Historis dan bila di kembangkan dapat menambah objek wisata yang ada di kecamatan ini, untuk itu kepala dinas Instansi terkait kiranya dapat membantu menggalakkannya.

#### Pemerintahan

##### a. Kantor Camat Koto Kampar Hulu

Kantor Camat Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Kampar, dikepalai oleh seorang camat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibantu 1 (satu) orang Sekretaris Kecamatan (Sekcam), 3 (tiga) Kepala Seksi, dan Staf. Sekretaris Kecamatan (Sekcam) memimpin 2 (dua) sub bagian yaitu sub bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian keuangan, dengan rincian:

**Tabel 1.5**

**Rincian Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Kampar**

1.	Camat	:	Eselon III.a	Terisi
2.	Sekretaris Kecamatan	:	Eselon III.b	Terisi
3.	- Kasubbag Umum dan Kepegawaian	:	Eselon IV.b	Kosong
4.	- Kasubbag keuangan	:	Eselon IV.b	Terisi
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	:	Eselon IV.a	Terisi
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	:	Eselon IV.a	Terisi
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	:	Eselon IV.a	Terisi
8.	Staf (Fungsional Umum)	:	4 orang	



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di kecamatan Koto Kampar Hulu maka Camat mengambil kebijaksanaan dengan memperkerjakan Cleaning Service sebanyak 3 orang, penjaga kantor sebanyak 2 orang.

#### 1. Desa / Kelurahan Kecamatan Koto Kampar Hulu

Sesuai peraturan pemerintahan nomor : 72 tahun 2005 tentang desa.

Camat berfungsi sebagai pembina dan pengawas pemerintah Desa, di Kecamatan Koto Kampar Hulu terdapat 6 (enam) desa yaitu :

1. Desa Tanjung
2. Desa Tabing
3. Desa Pongkai
4. Desa Gunung malelo
5. Desa Sibiruang
6. Desa Bandur picak

#### 2. Instansi Vertikal di Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu :

- Danramil XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu
- Kapolsek XIII Koto Kampar dan Koto Kampar Hulu

Sedangkan dinas / instansi antara lain :

- Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Kampar Hulu
- BPP Kecamatan koto Kampar Hulu
- Korwil P dan K Kecamatan Koto Kampar Hulu
- UPTD Perkebunan Wilayah 1
- UPTD THP Wilayah 1
- UPTD Perikanan Wilayah I

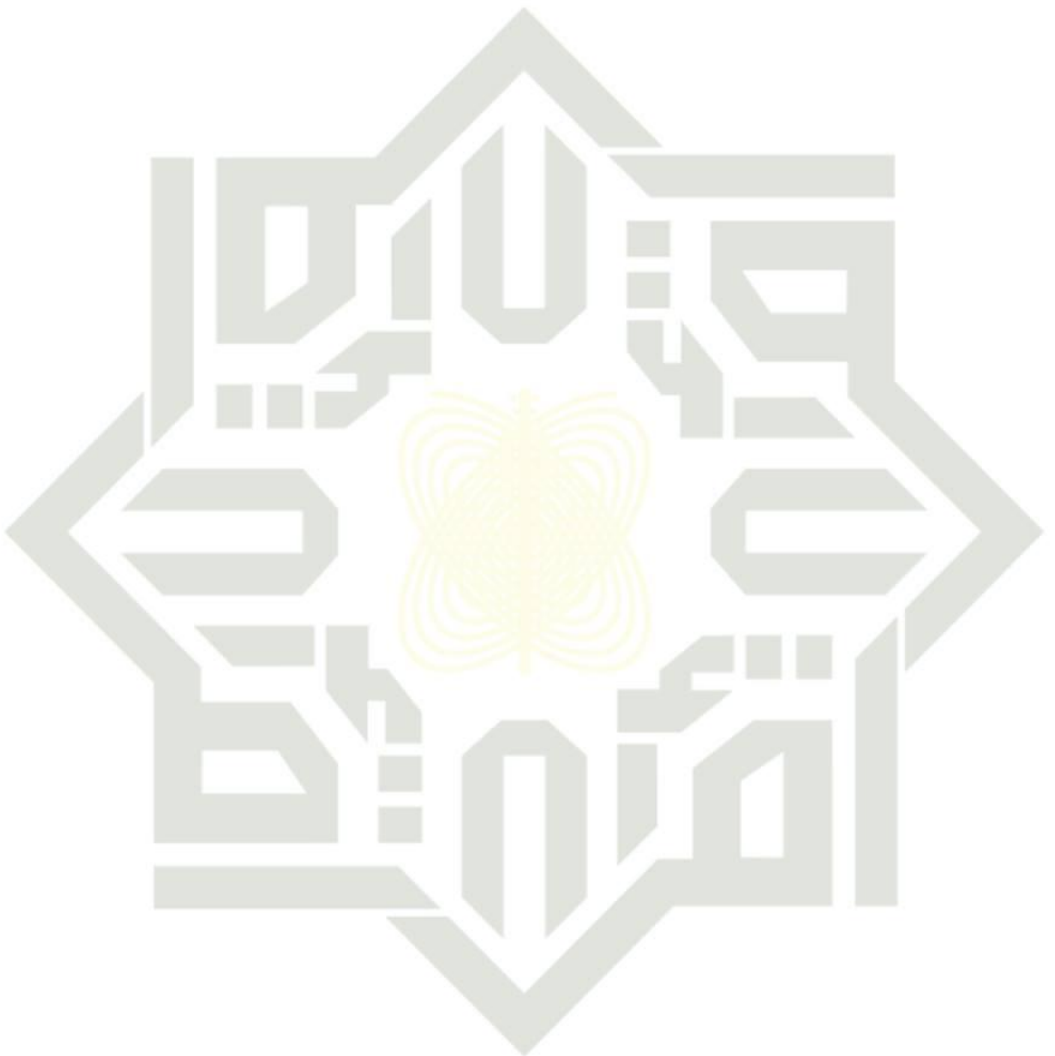
- UPTD Peternakan Wilayah I
- UPTD Pariwisata Seni dan Budaya
- UPTD Kesehatan (Puskesmas) Kecamatan Koto Kampar Hulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A TEORI PEMERINTAHAN DAERAH

##### 1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Menurut W.S Sayre Pemerintah dalam defenisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari Negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, Pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan tugas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>30</sup>

Sedangkan yang dikatakan Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah

<sup>29</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010),

<sup>30</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.<sup>31</sup>

C.F Strong yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.<sup>32</sup>

pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai :

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (*tugas medebewind*). Tugas ini adalah untuk turutserta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, melainkan juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya;
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak

<sup>31</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>32</sup> Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusamedia, 2012), h. 28.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.<sup>33</sup>

## 2. Kewenangan Pemerintah Daerah

Merunut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kewenangan mengandung arti :

- (1) Hal wewenang
- (2) Hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kata wewenang mengandung arti :

- (1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak
- (2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>34</sup>

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “bevoegdheid” ( yang berarti wewenang

<sup>33</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2006), h. 77.

<sup>34</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Nuansa, 2012), h. 143

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>35</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor diakatan bahwa pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan dibidang lainnya yang meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara macro, dana perimbangan keuangan, sistem

<sup>35</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 154.

<sup>36</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.<sup>37</sup>

## B. TEORI GANGGUAN JIWA

### 1. Defenisi Gangguan jiwa

Gangguan jiwa atau penyakit mental adalah gangguan atau penyakit yang menghalangi seorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan jiwa sering disebut dengan tidak sehat mental. Sehat mental atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan kesehatan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.<sup>38</sup>

Defenisi serupa juga menyebutkan bahwa gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, bisa dikarenakan faktor rohani maupun faktor jasmani (penyakit, cacat bawaan, disfungsi organ atau akibat kecelakaan) yang membuat seseorang tidak percaya diri, minder, gelisah, panik, frustrasi maupun depresi.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> C.S.T Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 83.

<sup>38</sup> Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), h. 9

<sup>39</sup> Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, (Jakarta: Puslitbang, 2010), h.10

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gangguan jiwa adalah gangguan pada kejiwaan seseorang yang menyebabkan pada penderitaan seseorang pada individu serta hambatan dalam melaksanakan peran sosialnya.

## 2. Jenis-Jenis Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa yang dialami oleh pasien yang berada dirumah sakit jiwa maupun balai pengobatan jiwa sangatlah beraneka ragam. Salah satu jenis gangguan jiwa yang mendapatkan perawatan intensif dari rumah sakit jiwa adalah gangguan psikotes. Gangguan psikotes adalah suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya ketidak mampuan seseorang dalam menilai realitas. Karena adanya ketidakmampuan tersebut, maka pasien penderita gangguan psikotes tidak merasa dirinya sakit. Pasien tidak akan datang berobat jika tidak terdorong kemauannya sendiri dan biasanya orang lainlah yang berpendapat bahwa dia sakit dan membutuhkan pertolongan.<sup>40</sup>

Gangguan psikotes dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:<sup>41</sup>

### a. Gangguan Skizofrenia

Skizofrenia memiliki ciri-ciri diantaranya pengunduran diri atau kurangnya perhatian terhadap kenyataan. Simtom-simtom yang sangat umum pada penderitaskizofrenia meliputi delusi, halusinasi dan disorganisasi proses pikiran.

Delusi adalah keyakinan-keyakinan yang salah yang tidak rasional yang melekat pada seseorang sehingga tidak mungkin lagi

<sup>40</sup> Soekrama, *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan* (Jakarta: Purna Bhakti, 2001), h. 38

<sup>41</sup> Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 3*, (Yogyakarta : Kanisius, 2006), h. 20

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berubah. adapun halusinasi adalah pengungkapan seseorang tentang kenyataan secara salah dan sama sekali tidak tepat, mendengar, mencium atau melihat segala sesuatunya yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan disorganisasi proses pikiran adalah pikiran-pikiran penderita skizofrenia yang diungkapkan tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan sama sekali tidak mengandung arti kalau pikiran-pikiran tersebut disatukan.<sup>42</sup>

#### b. Gangguan Bipolar

Gangguan Bipolar disebabkan oleh abnormalitas dalam metabolisme tubuh gangguan ini dibagi menjadi tiga tipe yakni, tipe manik, tipe depresif dan tipe campuran. Adapun pengertiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe manik adalah kondisi individu yang tidak merasa bingung, cemas atau mengalami depresi melainkan merasa bahagia, gembira dan tidak memikiarkan masalah yang ada sehingga dia kelihatan meriah serta berbicara sangat cepat dengan kata-kata yang tidak karuan.
- 2) Tipe depresif adalah kondisi individu yang sangat berlawanan dengan tipe manik dimana tipe depresif ini seseorang merasa sangat depresi, tidak responsif dan tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menunggu lama sebelum menjawab.

<sup>42</sup> Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 79



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tipe campuran yang artinya gambaran-gambaran yang simtomnya adalah manik dan depresif tercampur dan berubah-ubah dalam jangka waktu beberapa hari.<sup>43</sup>

### 3. Ciri-Ciri Gangguan jiwa

Ciri-ciri pada penderita gangguan jiwa adalah skizofrenia adalah

- a. Individu mengalami konflik batin seperti cemas, acuh tak acuh, iri hati, rasa tidak aman, kehilangan harga diri, agresif dan kepercayaan diri.
- b. Disorientasi sosial dan komunikasi sosial terputus seperti khayalan yang menakutkan, aktivitas berlebihan, kecurigaan yang berlebihan, khayalan dirinya paling super, tidak memiliki kesadaran hidup dengan orang lain.
- c. Gangguan emosional dan intelektual yang parah dan serius seperti persepsi yang dari penglihatan, khayalan yang tidak benar, emosi yang tidak tepat dan kepribadian terpecah.<sup>44</sup>

### 4. Dampak Gangguan jiwa

Adanya gangguan jiwa pada seorang pasien dapat menimbulkan kondisi antara lain:<sup>45</sup>

- a. Gangguan aktivitas hidup sehari-hari

Adanya gangguan jiwa pada seseorang dapat mempengaruhi kemampuan orang tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti kemampuan untuk merawat diri seperti mandi, berpakaian, menggosok gigi atau berkurangnya kemampuan dan kemauan untuk memenuhi

<sup>43</sup> Yustinus Semiun, *Op.cit*, h.21

<sup>44</sup> Lilik Djuari, *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, (Surabaya: Airlangga, 2005), h.

<sup>45</sup> Inu Wicaksana, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008), h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan dasarnya seperti tidak mau makan, minum, buang air kecil serta diam dengan sedikit gerakan. Apabila kondisi dibiarkan berlanjut, maka akhirnya juga dapat menimbulkan penyakit fisik seperti kelaparan dan kurang gizi, sakit infeksi saluran pencernaan dan pernafasan serta adanya penyakit kulit atau penyakit lainnya.

b. Gangguan hubungan interpersonal

Disamping berkurangnya kemampuan pasien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seorang pasien kadang mengalami penurunan kemampuan melakukan hubungan(komunikasi) dengan orang lain. Pasien mungkin tidak mau bicara, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain atau menghindar dan memberontak ketika didekati orang lain. Disamping itu pasien tidak mau bicara dengan terang-terangan apa yang difikirkannya.

## 5. Upaya Penanganan Gangguan Jiwa

Sebagai pelaksana pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, puskesmas melakukan upaya yang meliputi promosi/preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif yang mana tiga peran puskesmas ini disebut Tri Upaya Bina Jiwa. Pelaksanaan tersebut dilakukan di lingkungan keluarga, lembaga dan masyarakat. Adapun penjelasan dari Tri Upaya Bina Jiwa adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

a. Upaya Promosi dan Preventif

1) Upaya promosi

<sup>46</sup> Ibid, h. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya promosi merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan penyelenggara kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Upaya ini bertujuan untuk menghilangkan stigma diskriminasi, pelanggaran hak asasi penderita gangguan jiwa yang ada pada sebagian masyarakat.

2) Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Adapun tujuan upaya preventif adalah untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan, mencegah timbulnya dan kambuhnya gangguan jiwa, mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan dan mencegah timbulnya dampak masalah psikososial.

b. Upaya kuratif (pengobatan)

Upaya kuratif merupakan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan jiwa yang mencakup proses diagnosis dan pengobatan yang tepat. Pada tahap kuratif ini penderita gangguan jiwa diberi obat-obatan sebagai penenang atau mencegah kekambuhan.

c. Upaya Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi merupakan kegiatan atau serangkaian pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial serta mempersiapkan dan memberi kemampuan penderita gangguan jiwa agar



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandiri di masyarakat, upaya rehabilitasi pada gangguan jiwa meliputi rehabilitasi psikologi dan sosialnya yang istilahnya rehabilitasi psikosial.

Upaya penanganan gangguan jiwa yang dilakukan oleh petugas kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Bekerjasama dengan lembaga kesehatan mental
- 2) Konsultasi dengan yayasan kesejahteraan
- 3) Memberikan pelayanan diluar klinik
- 4) Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa puskesmas mempunyai peran penting dalam pelayanan kesehatan jiwa yang fungsinya tidak hanya menunggu dan mengobati pasien tetapi juga menjadi pusat rujukan, pusat penyuluhan dan pembinaan kesehatan jiwa masyarakat dan pusat rehabilitasi.

## TEORI PEMASUNGAN

### 1. Pengertian pasung

Pasung merupakan suatu tindakan memasang sebuah balok kayu pada tangan dan/atau kaki seseorang, diikat atau dirantai, diasingkan pada suatu tempat tersendiri di dalam rumah ataupun di hutan. Keluarga dengan klien gangguan jiwa yang dipasung seringkali merasakan beban yang berkaitan dengan perawatan klien. Alasan keluarga melakukan pemasungan adalah mencegah perilaku kekerasan, mencegah risiko bunuh diri, mencegah klien

<sup>47</sup> Iyus Yosep, *Op.cit*, h.16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan rumah dan ketidak mampuan keluarga merawat klien gangguan jiwa.<sup>48</sup> Jiwa adalah unsur manusia yang bersifat nonmateri, tetapi fungsi dan manifestasinya sangat terkait pada materi.<sup>49</sup>

Kebanyakan pelaku dari kasus pemasungan ini adalah keluarga dari si penderita gangguan jiwa itu sendiri. Keluarga penderita pada umumnya tidak paham apa yang sebaiknya mereka lakukan terhadap para penderita. Keluarga juga khawatir jika yang bersangkutan nantinya melakukan tindakan merusak atau bahkan kekerasan kalau sakitnya itu kambuh. Faktor keterbatasan ekonomi juga jadi faktor penting kenapa penderita tidak dilarikan ke rumah sakit jiwa.

## 2. Sejarah Pemasungan Di Indonesia

Pemasungan masih terus terjadi di tanah air meskipun praktik tersebut telah dilarang oleh pemerintah semenjak tahun 1977. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan dianggap sebagai orang yang tidak lagi punya harapan untuk menjalani kehidupan secara normal. Tidak jarang mereka diperlakukan lebih parah daripada seekor binatang. Tidak jarang pula mereka dipasung oleh keluarga dan masyarakat sekitar karena dianggap dapat membahayakan dan mengganggu ketentraman warga lainnya.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Bakti Suharto, Budaya Pasung dan Dampak Yuridis Sosiologis (Studi Tentang Upaya Pelepasan Pasung dan Pencegahan Tindakan Pemasungan di Kabupaten Wonogiri). IJMS - Indonesian Journal on Medical Science – Volume 1 No 2 – Juli 2014, <http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/21/21>. Diakses pada tanggal 20 februari 2018 pukul 19.30.

<sup>49</sup> Ahmad Yusuf Dkk, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Salemba Medika, 2015) hal 4.

<sup>50</sup> Yangki Imade Suara, Sejarah Panjang Praktik Pasung di Indonesia. (Artikel ini pertama kali dipublikasikan di rubrik Wacana Harian Pikiran Rakyat tanggal 19 April 2016).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melarang praktik pemasangan semenjak tahun 1977. Akan tetapi praktik pasung ini terus saja terjadi selama empat puluh tahun terakhir. Berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, Kementerian Kesehatan mencatat setidaknya sebanyak 57 ribu orang pernah dipasung oleh keluarganya. Atau sekitar 14.3% dari Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJB).

Pada tahun 2014, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2014. Kementerian Sosial juga mencanangkan Indonesia Bebas Pasung 2017. Tentunya ini adalah sebuah misi yang sangat mulia mengingat mereka yang menderita gangguan kejiwaan sudah seharusnya diperlakukan layaknya manusia. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah warga negara yang haknya wajib dilindungi oleh pemerintah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memuluskan misi itu.

Pertama, perlu sosialisasi yang aktif dari pemerintah tentang informasi kesehatan jiwa. Stigma negatif bahwa gangguan kejiwaan adalah sebuah kutukan harus dimentahkan oleh pemerintah. Pendidikan dan penyebaran informasi yang benar tentang penyakit kesehatan jiwa mempunyai peran yang sangat krusial dalam mencapai tujuan mulia Indonesia Bebas Pasung. Diharapkan dengan promosi yang gencar dari pemerintah, keluarga korban bisa melaporkan kondisi kesehatan keluarganya sedini mungkin kepada pihak terkait. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati.

Kedua, keluarga pasien dan masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberantas praktik pasung di Indonesia. Kita seolah-olah sudah terlena



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pasung adalah praktik yang lumrah dilakukan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan demi keselamatan warga sekitar. Sudah saatnya juga masyarakat melaporkan praktik keji tersebut kepada pihak yang berwenang sehingga tidak ada lagi cerita pasung di tengah-tengah masyarakat. Di banyak kasus, tidak adanya biaya untuk pengobatan korban juga menjadi batu sandungan dalam mencapai target Indonesia Bebas Pasung. Ini bisa diminimalisir oleh pemerintah dengan membebaskan biaya pengobatan bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan.

Ketiga, pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, wajib untuk menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. Seperti misalnya: menyediakan sarana dan prasana dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa.<sup>51</sup> melakukan rehabilitasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); dan mempidana orang yang dengan sengaja atau menyuruh orang lain untuk memasung, menelantarkan dan melakukan kekerasan terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Keempat, penanganan pasca program rehabilitasi juga menjadi salah satu kunci utama kesuksesan Indonesia Bebas Pasung. Orang yang dipasung, layaknya korban kekerasannya lainnya sangat rentan dengan trauma yang acapkali akan selalu menghantui mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan pendampingan baik oleh tenaga medis dan juga keluarga korban untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang

---

<sup>51</sup> Pasal 77 Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layak dari lingkungannya. Perlakuan diskriminatif yang selama ini selalu disematkan kepada mereka harus segera ditinggalkan.

### 3. Faktor pemasangan orang yang mengalami gangguan Jiwa

Adapun faktor-faktor adanya pemasangan jiwa yaitu:<sup>52</sup>

- a. Ketidaktahuan pihak keluarga, rasa malu pihak keluarga, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak adanya biaya pengobatan, dan tindakan keluarga untuk mengamankan lingkungan merupakan penyebab keluarga melakukan pemasangan.
- b. Perawatan kasus psikiatri dikatakan mahal karena gangguannya bersifat jangka panjang. Biaya berobat yang harus ditanggung pasien tidak hanya meliputi biaya yang langsung berkaitan dengan pelayanan medik seperti harga obat, jasa konsultasi tetapi juga biaya spesifik lainnya seperti biaya transportasi ke rumah sakit dan biaya akomodasi lainnya.
- c. Mencegah klien melakukan tindak kekerasan yang dianggap membahayakan terhadap dirinya atau orang lain.
- d. Mencegah klien meninggalkan rumah dan mengganggu orang lain
- e. Mencegah klien menyakiti diri seperti bunuh diri
- f. Ketidaktahuan serta ketidakmampuan keluarga menangani klien apabila sedang kambuh.
- g. Faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan keluarga merupakan salah satu penyebab pasien gangguan jiwa berat hidup terpasung.

<sup>52</sup> 8Fitri, L.D.N, Hubungan Pelayanan Community Mental Health Nursing (CMHN) dengan Tingkat Kemandirian Pasien Gangguan Jiwa di Kabupaten Bireuen Aceh (2007).<http://ikhshanbeck.blogspot.co.id/2014/12/masalah-psikososial-pasung-pada-pasien.html>. diakses pada tanggal 20 november 2017 pukul 18.00.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka, dapat ditarik kesimpulan :

1. Tanggung jawab pemerintah kabupaten kampar pada kecamatan koto kampar hulu terhadap penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya sangat penting dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017, yaitu melaksanakan advokasi dan sosialisasi, Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau dan melakukan kunjungan rumah atau layanan rumah. Namun, dikecamatan koto kampar hulu hal ini tidak berjalan dengan sesuai dengan ketentuan tersebut. Pemerintah kabupaten kampar kurang memperhatikan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa, baik dalam memberikan advokasi dan sosialisasi, Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau maupun melakukan kunjungan rumah atau layanan rumah sehingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tersebut tidak terlaksanakan dengan baik.
2. Adapun kendala atau hambatan yang dialami oleh pemerintah kabupaten kampar dalam tanggung jawab pada kecamatan koto kampar hulu dalam penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa adalah kurangnya advokasi dan sosialisasi, kurangnya pelayanan Kesehatan Yang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bermutu, Aman dan terjangkau dan tidak efektifnya pelayan kunjungan rumah dan layanan harian.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Terkait dengan tanggung jawab hendaknya pemerintah kabupaten kampar lebih memperhatikan orang dengan gangguan jiwa supaya penanggulangan pemasangan orang dengan gangguan jiwa bisa dilaksanakan dengan semestinya, sehingga tidak adalagi orang gila baik yang dipasung ataupun yang rentan untuk dipasung.

Terkait denga hambatan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten kampar, harus perlunya dilakukan peningkatan kapasitas yang khusus seperti pengetahuan, wawasan, dan pelatihan terutama bagi petugas yang menangani atau yang berinteriksi langsung terhadap orang dengan gangguan jiwa agar tidak ada lagi peningkatan terus-menerus orang dengan gangguan jiwa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Alfiadzi Fitrikasari, *Penilaian Fungsi Pribadi dan sosial sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pengobatan Pada Penderita Gangguan Jiwa Korban Pemasungan*, Semarang: Media Medika Indonesiana, 2012

Ahmad Yusuf Dkk, *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Salemba Medika, 2015

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010

C.S.T Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Hawari, Dadang. *Manajemen stress, cemas dan depresi*. Jakarta: FKUI. 2001

I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Malang: Setara Press, 2012

Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Refika Aditama, 2010

Inu Wicaksana, *Mereka Bilang Aku Sakit Jiwa*, Yogyakarta: Kanisius, 2008

Ishaq, *Dasar Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Garafika, 2012

Iyus Yosep, *Keperawatan Jiwa*, Bandung: Refika Aditama, 2010

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003

Janiarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Nuansa, 2012

Kastari dkk., 2012, *Kitab Undang Undang Tentang Kesehatan dan Kedokteran*, Cetakan pertama, Buku Biru, Jogjakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Elilik Djuari, *Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan*, Surabaya: Airlangga, 2005

Lysa Angrayni, *pengantar ilmu hukum*, Yogyakarta:kalimedia, 2017

Matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012

Matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusamedia, 2012

Poppy Kumala, dkk,1998, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 322

Sa'adi, *Nilai Kesehatan Mental Islam Dalam Kebatinan Kawruh Jiwa Suryomentaram*, Jakarta: Puslitbang, 2010

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006

SF Marbun dkk, *Dimensi Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2002

SF Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Soekrama, *Peningkatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Serta Penanggulangan Stress*, Jakarta: Purna Bhakti, 2001

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Prenada Media Group

Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 1*, Yogyakarta : Kanisius, 2006

Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental 3*, Yogyakarta : Kanisius, 2006

### Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1944

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah





Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penganggulan Kesehatan Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa.

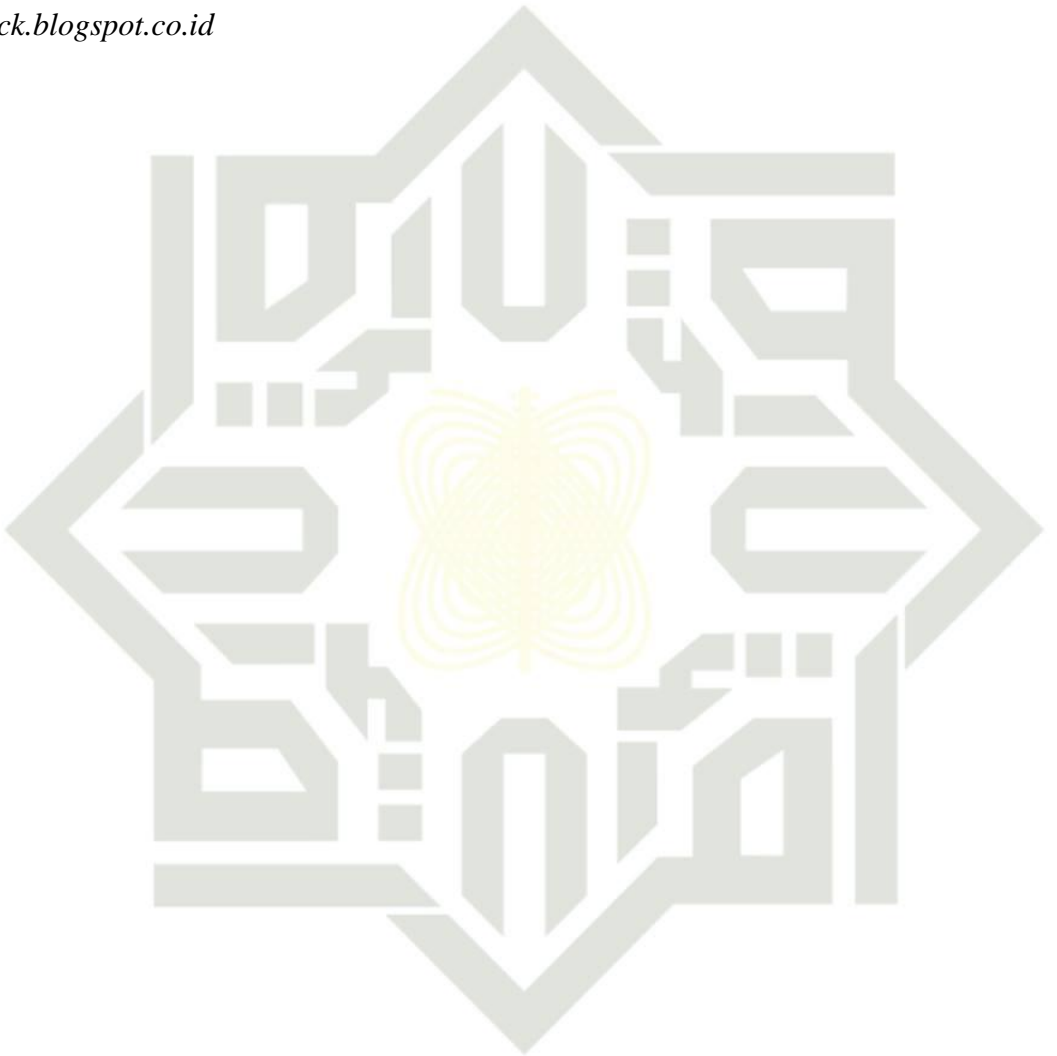
Internet

<http://ejournal.ijmsbm.org/index.php/ijms/article/view/21/21>

<http://ikhsanbeck.blogspot.co.id>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

### KELUARGA KORBAN ODGJ YG PERNAH ATAUPUN SEDANG DIPASUNG

1. Apa penyebab pemasungan terhadap korban?
2. Bagaimana Jika tidak dilakukan pemasungan?
3. Sejak kapan si korban mulai dipasung?
4. Bagaimana peran pemerintah terhadap orang dengan gangguan jiwa selama dilakukan pemasungan?
5. apa tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau puskesmas datang untuk merehabilitasi atau mengobati?

### KELUARGA KORBAN ODGJ YG BELUM PERNAH DIPASUNG

1. Apa penyebab gangguan jiwa terhadap korban?
2. Sejak kapan si korban mulai mengidap gangguan jiwa?
3. Apakah si korban sering mengganggu atau merugikan orang lain?
4. Apakah pernah dilakukan pemasungan terhadap korban?
5. Bagaimana peran pemerintah terhadap orang dengan gangguan jiwa?

### DINAS KESEHATAN

1. Apa peranan pemerintah terhadap penanggulangan pemasungan ODGJ?
2. Sejak kapan pelayanan penanggulangan pemasungan ODGJ ini dilakukan?
3. Apakah ada pelatihan untuk pegawai dari dinas kesehatan ataupun puskesmas dalam menanggulangi pemasungan ODGJ ini?
4. Apakah pegawai yg melakukan rehabilitasi paham tentang mengatasi penanggulangan pemasungan terhadap ODGJ?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan rehabilitasi terhadap ODGJ agar tidak terjadi pemasungan?

#### PUSKESMAS

1. Apakah ada tim dari puskesmas yang turun ke lapangan dalam memberikan rehabilitasi ataupun kunjungan rumah terhadap ODGJ?

Jika ada - berapa orang?

-Berapa kali dalam sebulan?

2. Sejak kapan mulai berjalan kegiatan pelayanan penanganan terhadap ODGJ?
3. Apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam memberikan rehabilitasi terhadap ODGJ?
4. Apakah sebelumnya ada pelatihan khusus yang diberikan pemerintah terhadap pegawai yang menangani rehabilitasi terhadap ODGJ?
5. Apakah ada faktor penghambat dalam memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap ODGJ?





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW  
Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR PADA KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU TERHADAP PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA, ditulis oleh saudara :

Nama : TIO PRASETIO  
NIM : 11527104526  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Sabtu / 18 Mei 2019  
Narasumber : Roni Kurniawan, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub Bagian Akademik

**Asfendi, S.Ag. M.Si**  
NIP. 19610918 198803 1002

Pekanbaru, Mei 2019

Narasumber

**Roni Kurniawan, SH, MH**  
NIK. 130217086

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak



UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmtsp@riau.go.id Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/23605  
TENTANG



032010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/F.I/PP.00.9/5430/2019** Tanggal 19 Juni 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | TIO PRASETIO  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11527104526   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR PADA KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU TERHADAP PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. KANTOR BUPATI KAMPAR<br>2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR<br>3. KANTOR CAMAT KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU<br>4. PUSKESMAS KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Juni 2019

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG KOTA**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2019/486

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/23605 tanggal 24 Juni 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama             | : | <b>TIO PRASETIO</b>  |
| 2. NIM              | : | 11527104526  |
| 3. Universitas      | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU  |
| 4. Program Studi    | : | ILMU HUKUM   |
| 5. Jenjang          | : | S1   |
| 6. Alamat           | : | PEKANBARU  |
| 7. Judul Penelitian | : | <b>TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR PADA KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU TERHADAP PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA</b> |
| 8. Lokasi           | : | 1.KANTOR BUPATI KAMPAR<br>2.DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR<br>3.KANTOR CAMAT KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU<br>4.PUSKESMAS KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang-  
pada tanggal 28 Juni 2019

an. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kasi. Kesatuan Bangsa



NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Kampar Di Bangkinang
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Kampar Di Bangkinang
3. Sdr. Camat Koto Kampar Hulu Di Tanjung
4. Kepala Puskesmas Koto Kampar Hulu Di Tanjung
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS KESEHATAN**

Jln. Dr. A. Rahman Saleh No.22 Telp. (0762) 20211 – 20133 Fax. (0762) 21047  
**BANGKINANG**

Kode Pos 28411

**SURAT KETERANGAN**

NO : 440/DINKES/P2P-2/2019/ 179

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT,SKM, MKM  
Nip : 19641111 198603 1 010  
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TIO PRASETIO  
Nim : 11527104526  
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
Program : Ilmu Hukum  
Alamat : Pekanbaru

Telah melakukan penelitian dengan judul “ Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada Kecamatan Koto Kampar Hulu terhadap pemasangan Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut peraturan menteri kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa” di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sejak tanggal 21 September 2019 s/d 25 September 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 25 September 2019  
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit



**RAHMAT, SKM, MKM**  
Pembina  
NIP : 19641111 198603 1 010

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**

JL.RAYA TANJUNG NO. 21 DESA TANJUNG  
TANJUNG

Kode Pos : 28453

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/UM-KTKH/2019/54

**Tentang**

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Camat Koto Kampar Hulu, setelah membaca Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/486, tanggal 28 Juni 2019, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin riset kepada :

- |    |                         |   |   |
|----|-------------------------|---|---|
| 1  | Nama                    | : | TIO PRASETIO  |
| 2  | NIM                     | : | 11527104526   |
| 3  | Fakultas                | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU   |
| 4  | Jurusan / Program Studi | : | ILMU HUKUM  |
| 5  | Jenjang                 | : | S1  |
| 6  | Alamat                  | : | PEKANBARU   |
| 8  | Judul Penelitian        | : | TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR PADA KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU TERHADAP PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA |
| 9  | Lokasi                  | : | 1. KANTOR CAMAT KOTO KAMPAR HULU<br>2. PUSKESMAS KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU   |
| 10 | Keterangan              | : | Pelaksanaan penelitan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku.  |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah di tetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.

Demikian Rekomendasi ini di keluarkan, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terima kasih.

Di keluarkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 19 Agustus 2019

a.n CAMAT KOTO KAMPAR HULU  
SEKCAM

HERMAN, M.Si

NIP.196412311995021002

**Rekomendasi ini di sampaikan kepada Yth :**

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS KOTO KAMPAR HULU**

Jalan Raya Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kode Pos 28453  
Email : [puskesmaskotokamparhulu@yahoo.com](mailto:puskesmaskotokamparhulu@yahoo.com) Hp. 081264073688



**SURAT KETERANGAN**

No : 445/PUSK-KKH/2019/5394

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Z U R N I, SKM  
NIP : 19690103 198911 2 001  
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Koto Kampar Hulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tio Prasetyo  
NIM : 11527104526  
Universitas : Universitas Islam Negeri Suska Riau  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Pekanbaru

Benar telah melakukan penelitian di UPTD Puskemas Koto Kampar Hulu sejak tanggal 21 Agustus 2019 s/d 17 September 2019.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibiruang, 17 September 2019  
Kepala UPTD Puskesmas Koto Kampar Hulu

**Z U R N I, SKM**  
Penata TK I

NIP. 19690103 198911 2 001

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi ini berjudul **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR TERHADAP PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA** (Studi di Kecamatan Koto Kampar Hulu), yang ditulis oleh:

Nama : **TIO PRASETIO**  
 NIM : 11527104526  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 08 November 2019  
 Waktu : 13:30  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 November 2019

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Drs. Zainal Arifin, M.A**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan S.H., M.H**

Penguji I  
**Joni Alizon S.H., M.H**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu S.H., M.H**

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Erni, S.Sos., MM**  
 NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### RIWAYAT HIDUP PENULIS



**TIO PRASETIO**, lahir di Tanjung (salah satu desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar) pada tanggal 13 Mei 1997. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara. Nama ayah Janizar dan Ibu Resmawati. Riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut, Taman Kanak-kanak pada TK Harapan Maju pada tahun 2003. Tamat Sekolah Dasar Negeri 002 Tanjung pada tahun 2009. Tamat pada SMPN 1 Koto Kampar Hulu pada tahun 2012, kemudian Tamat pada SMAN 1 Koto Kampar Hulu pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2015-2019. Ketika menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Pengadilan Negeri Kelas I B Bangkinang dan juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Gemilang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Penulis kemudian melaksanakan penelitian pada bulan Juni 2019 sampai November 2019 dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Terhadap Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Studi Di Kecamatan Koto Kampar Hulu)”**. Pada tanggal 08 November 2019 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).